



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Agustus 2018

Halaman: 2

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DIGENCARKAN

Pondokan Tanpa Induk Semang Kena Sanksi

GONDOKUSUMAN (MERAPI) - Wilayah kecamatan dan kelurahan diminta meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi kegiatan maupun perilaku negatif di pondokan.

"Pondokan sudah diatur di Perda Pondokan bagaimana tata cara dan kelolanya. Saya harap masyarakat agar peduli. Tidak dibiarkan bebas. Camat dan lurah saya minta terus sosialisasikan perda pondokan ini," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat membuka Ngobrol Pendidikan Islam di MAN 1 Yogyakarta, Rabu (29/8).

Walikota mengakui Perda Pondokan tersebut belum efektif jika tidak ada peran dari masyarakat dalam mengontrol kegiatan pondokan-pondokan di wilayah masing-masing. Pihaknya menegaskan pondokan harus memiliki induk semang maupun orang yang ditugaskan untuk mengelola sekaligus bertanggung jawab terhadap para penghuninya. Sanksi akan diberikan pemkot apabila ketentuan pondokan itu tak dilaksanakan.

"Harus ada orang yang bertanggung jawab menjadi perwalian para penghuni pondokan kalau terjadi apa-apa. Kalau tidak ada kena sanksi. Itu sebagai kontrol misal ada perilaku negatif penghuni pondokan yang meresahkan masyarakat," tegasnya.

Dia juga memastikan pondokan eksklusif juga tidak lepas dari sasaran pengawasan. Pemangku wilayah harus mengontrol keamanan sosial di masyarakat dan perilaku para penghuni pondokan. Pondokan dan asrama di Kota Yogyakarta tidak boleh tertutup, sehingga ke-

lurahan bisa masuk mengontrol. "Pondokan dan asrama di Yogya tidak steril tapi tetap terjaga privasinya. Artinya tidak ada yang tertutup untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus narkoba, miras dan prostitusi di pondokan," terang Haryadi.

Peningkatan pengawasan pondokan itu juga untuk mendukung gerakan belajar di Yogya tinggal di pondok maupun indokos berkonsep pondok pesantren (ponpes) yang diwacanakan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta. Pihaknya mendukung pembinaan rohani di pondokan sesuai agama masing-masing.

"Misalnya untuk yang muslim setidaknya ada musala dan saling mengingatkan perilaku. Yang Kristen mungkin ada pendeta yang seminggu sekali datang ke pondokan," tambahnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Sigit Warsita menyampaikan, ada kekhawatiran dari sebagian orangtua pelajar luar daerah terhadap kondisi Yogya dengan fenomena tawuran pelajar, klitih, hamil di luar nikah dan narkoba.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Kemenag Kota Jk</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Serius
2. <u>Satpol PP</u>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3. <u>TP PKK Kota Jk</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. TP. PKK/ Dekranasda	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005